2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19650211 199403 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 261.483.345.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 246.128.071.331,00 (94,13%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 101 (seratus satu) sub kegiatan. Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang memiliki berdimensi pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 261.485.345.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 240.128.071.351,00 (94,13%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 101 (seratus satu) sub kegiatan. Dinas Pendidikan, sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Gambaran Organisasi 3
D. Isu Strategis 7
E. Sistematika Penulisan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Rencana Strategis 9
B. Tujuan dan Sasaran 10
C. Indikator Kinerja Utama 10
D. Perjanjian Kinerja 2021 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Kerangka Pengukuran Kinerja 15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama 17
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analis Capaian Indikator Kinerja Utama 29
D. Akuntabilitas Keuangan 38
BAB IV PENUTUP 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021

C. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan, tugas dan fungsi

   a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
   b. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal ataupun non formal;
   c. pembinaan dan pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan;
   d. penyusunan pedoman, pelaksanaan, dan evaluasi kompetisi peserta didik, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
   e. pembinaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
   f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
   g. pengawasan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
   h. pengawasan dan pembinaan pelayanan perpustakaan sekolah dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM);
   i. pengkoordinasian penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;
   j. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
   k. pembinaan pengeloaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
   l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
   m. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan;
   n. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pembinaan pendidikan dasar;
   o. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan

prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan sarana prasarana kantor;

p. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar;

q. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang SD, terdiri dari :
   1) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
   2) Seksi Kelembagaan SD;
   3) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD;

d. Bidang SMP, terdiri dari :
   1) Seksi Sarana dan Prasarana SMP
   2) Seksi Kelembagaan SMP
   3) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SMP

e. Bidang PAUD dan PNF
   1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
   2) Seksi kelembagaan PAUD dan PNF
   3) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD dan PNF

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
   1) Seksi Administrasi dan Pembinaan PTK;
   2) Seksi Pendataan dan Penatan PTK;
   3) Seksi Kinerja, Kesejahteraan dan Pengembangan PTK.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Pengawas SD;
b. Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
c. Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;
d. Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal
e. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
f. Jabatan Fungsional Arsiparis.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota di dukung oleh 99 (sembilan puluh sembilan) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	11
6.	Pengawas SMP	5
7.	Pengawas SD	12
8.	Pengawas PAUD/TK	3
9.	Penilik	6
10.	Pranata Komputer	1
11.	Arsiparis	1
12.	Pelaksana PNS	23

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
13.	Pelaksana Non PNS	28
	Jumlah	99

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda / IV.c	1
2	Pembina Tk. I / IV.b	7
3	Pembina / IV.a	14
4.	Penata Tingkat I / III.d	20
5.	Penata / III.c	4
6.	Penata Muda Tingkat I / III.b	9
7.	Penata Muda / III.a	7
8.	Pengatur Tingkat I / II.d	4
9.	Pengatur / II.c	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	4
11.	Non PNS	28
	Jumlah	99

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	S2	19	1	20
2.	S1	33	10	33
3.	D3	7	4	11
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA	11	9	20
7.	SLTP	1	2	3
8.	SD	0	2	2
	Jumlah	71	28	99

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

NO.	Usia	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	56 tahun lebih	12	-	12
2.	51-55 tahun	26	3	29
3.	46-50 tahun	11	1	12
4.	41-45 tahun	11	2	13
5.	36-40 tahun	9	6	15
6.	31-35 tahun	1	6	7
7.	26-30 tahun	0	7	7
8.	18-25 tahun	1	3	4
	Jumlah	71	28	99

D. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam masa tumbuh kembang anak;
2) Peningkatan pemerataan layanan penyelenggaraan Pendidikan bermutu pada semua jenjang;
3) Peningkatan akses layanan pendidikan dengan lebih memperhatikan pemerataan tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang;

4) Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan disertai upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih terjangkau;
5) Peningkatan kualitas dan implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik dan didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia;
6) Peningkatan kualitas hasil pembelajaran peserta didik;
7) Peningkatan pemahaman guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran bukan penerus pengetahuan;
8) Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;
9) Peningkatan tata kelola pendidikan yang partisipasif, transparan dan akuntabel;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Landasan Hukum,Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini berisi Rencana Strategis, Target IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.Rencana Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Pekalongan sebagai berikut :

➢ Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah :
   a. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan yang merata
   b. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang bermutu
   c. Meningkatkan implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter
   d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

➢ Sasaran dari Dinas Pendidikan adalah :
   a. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)
   b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)
   c. Meningkatnya Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Sekolah
   d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
   e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan :

Tabel 2.1

IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator	Rumus	Satuan	Target		
				2019	2020	2021
Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)						
1	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Jumlah peserta didik jenjang PAUD dibagi jumlah penduduk usia 3-6 tahun	Persen	100%	100%	100%
	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Jumlah peserta didik jenjang Dikdas dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Persen	65.00%	67.50%	70.00%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)						
2	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas kali 100%	Persen	75.00%	80.00%	85.00%

No.	Indikator	Rumus	Satuan	Target		
				2019	2020	2021
	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD Formal yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD Formal kali 100%	Persen	3.50%	4.50%	5.50%
	Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah					
3	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi pendidikan agama dibagi jumlah seluruh sekolah	Persen	100%	100%	100%
	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dibagi jumlah seluruh sekolah	Persen	55.00%	60.00%	65.00%
	Angka kenakalan pelajar	Jumlah siswa Jenjang Dikdas yang terlibat Kasus Kenakalan Pelajar per seratus siswa jenjang Dikdas	per-100 siswa	4	3	2
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja						
4	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP	Skor	72.50	75.00	77.50
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik						

No.	Indikator	Rumus	Satuan	Target		
				2019	2020	2021
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	800	850	900

D. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberi amanah/ tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari Perjanjian Kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2021 terdapat 5 (Lima) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021. Berikut adalah Perjanjian Kinerja di bidang pendidikan Tahun 2021 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	70%
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	85%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	5,5%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	65%
		Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	2
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	77,5
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat capaian Kinerja

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat capaian Kinerja

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator 11 Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	70%	58.33%	83%

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100%	100.25%	100.25%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	85%	66.49%	78.22%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	5.50%	34.23%	622%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100%	100%	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	65%	100%	154%
		Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	2	n/a	n/a
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	77.5	n/a	n/a
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	900	553	61%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang melebihi target, sama dengan target dan kurang/ tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

a. Indikator Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK belum mencapai target. Target yang direncanakan sebesar 70% dapat terealisasi 58,33 % atau tercapai 83%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.

b. Indikator Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 100% berhasil terealisasi 100,25% atau tercapai 100,25%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.

c. Indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A belum mencapai target. Target yang direncanakan sebesar 85% dapat terealisasi 66,49 % atau tercapai 78,22%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan efektif dalam pencapaian target indikator.

d. Indikator Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 5,5% dapat terealisasi 34,23 % atau tercapai 622%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.

e. Indikator Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil mencapai sesuai target. 100% atau tercapai 100%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.

f. Indikator Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 65% dapat terealisasi 100 % atau tercapai 154%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator

g. Indikator Angka Kenakalan Pelajar capaiannya tidak dapat disajikan datanya disebabkan kenakalan pelajar biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh / daring sehingga banyak pelajar yg beraktivitas di luar lingkungan sekolah dan tidak bisa dimonitor oleh pihak sekolah.

h. Indikator Nilai Evaluasi AKIP tidak dapat disajikan datanya karena Inspektorat Kota Pekalongan belum mengeluarkan nilai AKIP atas penilaian AKIP tahun 2021.

i. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik belum mencapai target. Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan berhasil mendapatkan nilai 55,3 (dikonversikan menjadi 553) dari nilai yang ditargetkan 900 atau tercapai 83%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan

a. Indikator Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/TK belum mencapai target. Target yang direncanakan sebesar 70% dapat terealisasi 58.03 % atau tercapai 83%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.
b. Indikator Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 100% berhasil terealisasi 100.25% atau tercapai 100.25% Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator
c. Indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A belum mencapai target. Target yang direncanakan sebesar 85% dapat terealisasi 66.19 % atau tercapai 78,22%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan efektif dalam pencapaian target indikator.
d. Indikator Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 5.5% dapat terealisasi 34.23 % atau tercapai 622%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.
e. Indikator Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil mencapai sesuai target. 100% atau tercapai 100%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator.
f. Indikator Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah berhasil melebihi target. Target yang direncanakan sebesar 65% dapat terealisasi 100 % atau tercapai 154%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target indikator
g. Indikator Angka Kenakalan Pelajar capaiannya tidak dapat disajikan datanya disebabkan kenakalan pelajar biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh / daring sehingga banyak pelajar yg beraktivitas di luar lingkungan sekolah dan tidak bisa dimonitor oleh pihak sekolah.
h. Indikator Nilai Evaluasi AKIP tidak dapat disajikan datanya karena Inspektorat Kota Pekalongan belum mengeluarkan nilai AKIP atas penilaian AKIP tahun 2021.
i. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik belum mencapai target. Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan berhasil mendapatkan nilai 55.7 (dikonversikan menjadi 557) dari nilai yang ditargetkan 680 atau tercapai 82%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan

sangat efektif dalam pencapaian target indikator.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Keterangan	
				2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	69.64%	60.28%	58.33%	▼	Turun
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100.81%	102.65%	100.25%	▼	Turun
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	68%	69.56%	66.49%	▼	Turun
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	9.09%	9.09%	34.23%	▲	Naik
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100%	100%	100%	●	Tetap
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	10%	100%	100%	●	Tetap
		Angka kenakalan pelajar	per-100 siswa	n/a	n/a	n/a	●	tetap
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	72.5	73.83	n/a	n/a	n/a
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	800	516	553	▲	Naik

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2021

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra 2021	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	58.33%	70%	83%	Berhasil
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100.25%	100%	100.25%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	66.49%	85%	78%	Berhasil
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	34.23%	5.50%	622%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	100%	65%	154%	Sangat Berhasil
		Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	n/a	2	n/a	n/a
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	n/a	77.5	n/a	n/a
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	553	900	61%	Tidak Berhasil

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	70%	58.33%	83%	Belum mencapai target karena : - Situasi pandemi Pembelajaran Tatap Muka masih dilakukan secara terbatas serta biaya pendidikan pada jenjang PAUD relatif lebih mahal dibandingkan pada jenjang SD/MI sehingga orang tua lebih memilih untuk menunda menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD, dan memilih langsung untuk dimasukkan ke Sekolah Dasar saat usia anaknya sudah memenuhi	1. Sosialisasi kepada masyarakat / orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini di kelas balita stunting di setiap kelurahan. 2. Meningkatkan kerjasama semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi PAUD
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100%	100.25%	100.25%	Kebijakan pemerintah Kota Pekalongan yang telah membebaskan biaya pendidikan pada sekolah negeri jenjang pendidikan dasar serta pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta berdampak meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.	
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	85%	66.49%	78%	Belum mencapai target karena : - Peringkat akreditasi beberapa satuan pendidikan mengalami penurunan - kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) propinsi Jawa Tengah tahun 2021 hanya untuk 5 sekolah - Adanya kenaikan standar penilaian akreditasi sekolah/madrasah dari periode sebelumnya. Sehingga walaupun secara mutu sekolah tidak ada penurunan namun secara grade nilai akreditasi sekolah	sosialisasi dan pendampingan secara intens kepada semua sekolah jenjang pendidikan dasar mengenai aturan penilaian akreditasi yang baru. Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan mutu satuan pendidikan dasar sehingga diperoleh data mutu satuan pendidikan yang nantinya bisa dijadikan dasar dalam merencanakan program dan kegiatan yang mendukung

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
							menjadi turun	pencapaian target indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A.
		Persentase Penyelenggaraa n PAUD berakreditasi A	Persen	5.50%	34.23%	622%	Berhasil mencapai target karena dukungan program dan kegiatan yang tepat sasaran, seperti penguatan kelembagaan PAUD, fasilitasi pendampingan akreditasi	
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100%	100%	100%	Berhasil mencapai target karena Adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan keagamaan serta dukungan anggaran yang memadai	
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	65%	100%	154%	Berhasil mencapai target karena Adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan karakter serta dukungan anggaran yang memadai	
		Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	2	n/a	n/a	Capaian yang tidak bisa disajikan datanya ditujukan untuk indikator Angka Kenakalan Pelajar, disebabkan Data Kenakalan pelajar berasal dari Pol. PP/ Kepolisian, dan kenakalan remaja biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pelajar berada di luar pengawasan sekolah	

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	77.5	n/a	n/a		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	900	553	61%	1. penerapan implementasi dari standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang belum bisa merata disemua jenis layanan	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
							2. sistem informasi yang ada belum dapat maksimal digunakan salah satunya terkait dengan kurangnya SDM pengelola	Membuat pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik
							3. pengaduan layanan yang dirasa belum tuntas	melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan
								Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik
								Menciptakan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
								Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
								Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
								Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
		Tahun 2021 (Rp)	Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)			
	Program Pengelolaan Pendidikan	86,099,480,000	78,583,383,822	91,27%
	Jumlah	*86,099,480,000*	*78,583,383,822*	*91,27%*
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)			
	Program Pengelolaan Pendidikan	940,693,000.00	811,296,722.00	86,24%
	Jumlah	*940,693,000.00*	*811,296,722.00*	*86,24%*
Sasaran 3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah			
	Program Pengembangan Kurikulum	89,951,000	88,784,900	98,70%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15,514,440,000	15,240,246,700	98,23%
	Jumlah	*15,604,391,000*	*15,329,031,600*	*98,24%*
Sasaran 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	147,575,000	119,053,000	80,67%

Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)			
	Program Pengelolaan Pendidikan	86,099,480,000	78,583,383,822	91,27%
	Jumlah	86,099,480,000	78,583,383,822	91,27%
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, anak usia dini dan PNF			
	Program Pengelolaan Pendidikan	940,693,000.00	811,296,722.00	86,24%
	Jumlah	940,693,000.00	811,296,722.00	86,24%
Sasaran 3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah			
	Program Pengembangan Kurikulum	59,951,000	58,784,900	98,05%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15,514,610,000	15,240,246,700	98,23%
	Jumlah	15,574,561,000	15,299,031,600	98,24%
Sasaran 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	147,575,000	119,055,000	80,67%

	Jumlah	*147,575,000*	*119,053,000*	*80,67%*
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	158,691,206,000	151,285,306,187	95,33%
	Jumlah	*158,691,206,000*	*151,285,306,187*	*95,33%*
Total		261,483,345,000.00	246,128,071,331.00	94,13%

Dari tabel di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR) melalui program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp 86,099,480,000 berhasil terealisasi Rp 78,583,383,822 atau 91,27%.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF) melalui program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp 940,693,000.00 berhasil terealisasi Rp 811,296,722.00 atau 86,24%.
- Sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah melalui program pengembangan kurikulum dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp 15,604,391,000 berhasil terealisasi Rp 15,329,031,600 atau 98,24%.
- Sasaran 4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui program Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 147,575,000 berhasil terealisasi Rp 119,053,000 atau 80,67%.
- Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui program Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 158,691,206,000 berhasil terealisasi Rp 151,285,306,187 atau 95,33%.

	Jumlah	147.575.000	119.055.000	80.67%
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	158.691.206.000	151.285.306.187	95.33%
	Jumlah	158.691.206.000	151.285.306.187	95.33%
Total		261.453.545.500,00	246.128.071.531,00	94.13%

Dari tabel di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR) melalui program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp 86.099.480.000 berhasil terealisasi Rp 78.583.383.822 atau 91.27%.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF) melalui program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp 940.693.000,00 berhasil terealisasi Rp 811.296.722,00 atau 86,24%.
- Sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah melalui program pengembangan kurikulum dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp 15.604.191,000 berhasil terealisasi Rp 15.329.031,600 atau 98,23%.
- Sasaran 4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui program Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 147.575.000 berhasil terealisasi Rp 119.055.000 atau 80.67%.
- Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui program Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 158.691.206,000 berhasil terealisasi Rp 151.285.306.187 atau 95.33%.

Tabel 3.8

Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	86,099,480,000	78,583,383,822	91,27%	91.79%	0.57%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	940,693,000.00	811,296,722.00	86,24%	350.29%	306.16%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	15,604,391,000	15,329,031,600	98,24%	126.92%	29.20%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	147,575,000	119,053,000	80,67%	n/a	n/a
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	158,691,206,000	151,285,306,187	95,33%	61.44%	-35.55%
	TOTAL	261,483,345,000	246,128,071,331	94%	126,09%	33,96%

Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 5 (lima) sasaran yang menjadi target kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kinerjanya. Efisiensi dapat dihitung dari realisasi capaian kinerja di bagi dengan realisasi anggaran di kurangi 1 di kalikan 100%,

Berdasarkan tabel diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

➢ Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR), persentase

realisasi anggaran sebesar 91,27%, Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 91,79%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar 0,57% ((91,7%/91,27% - 1)x100% = 0,57%).

- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF), persentase realisasi anggaran sebesar 86,24%, Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 350,29%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 2 tercapai efisiensi sebesar 306,16% ((350,29%/86,24% - 1)x100% = 250,29%).
- Sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah, persentase realisasi anggaran sebesar 98,24%, Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 126.92%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 3 tercapai efisiensi sebesar 29.20% ((126,92%/98,24% - 1)x100% = 29,20%).
- Sasaran 4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, persentase realisasi anggaran sebesar 98,24%, Sedangkan capaian kinerja belum dapat disajikan datanya, sehingga penilaian efisiensi belum dapat dilakukan.
- Sasaran 5 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, persentase realisasi anggaran sebesar 95,33%, Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 61,44%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 5 belum tercapai efisiensi.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 (Lima) Sasaran Strategis dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

realisasi anggaran sebesar 91.27%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 91.79%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar 0.57% ((91.79%/91.27% - 1)x100% = 0.57%)

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF), persentase realisasi anggaran sebesar 86.24%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 350.29%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 2 tercapai efisiensi sebesar 306.16% ((350.29%/86.24% - 1)x100% = 250.29%).

3. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah, persentase realisasi anggaran sebesar 98.24%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 126.92%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 3 tercapai efisiensi sebesar 29.20% ((126.92%/98.24% - 1)x100% = 29.20%).

4. Sasaran 4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, persentase realisasi anggaran sebesar 98.24%. Sedangkan capaian kinerja belum dapat disajikan datanya, sehingga penilaian efisiensi belum dapat dilakukan.

5. Sasaran 5 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, persentase realisasi anggaran sebesar 95.33%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 61.44%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 5 belum tercapai efisiensi.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 (Lima) Sasaran Strategis dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 meliputi pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar)

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar) dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi			
1	Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD/ TK	Persen	70%	58.33%	83.33%	70%	83.33%
2	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Persen	100%	100%	100.25%	100%	100.25%
	Rata-rata Capaian				91.79%		

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 1 yaitu meningkatnya partisipasi pendidikan (PAUD dan dasar) dengan 2 (dua) indikator kinerja dapat di inpterpretasikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Angka partisipasi sekolah jenjang PAUD/TK menunjukan persentase capaian sebesar 83,33% atau dengan predikat berhasil meskipun belum sesuai target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 masih dalam Situasi pandemi dan Pembelajaran Tatap Muka masih dilakukan secara terbatas serta biaya pendidikan pada jenjang PAUD relatif lebih mahal dibandingkan pada jenjang SD/MI sehingga orang tua lebih memilih untuk menunda menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD,

dan memilih langsung untuk dimasukkan ke Sekolah Dasar saat usia anaknya sudah memenuhi. Selain itu karena kurangnya pemahaman masyarakat/ orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini menjadi salah satu tantangan / hambatan dalam pencapaian indikator ini. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi memberikan Sosialisasi kepada masyarakat / orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini di kelas balita stunting di setiap kelurahan serta Meningkatkan kerjasama semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi PAUD.

2. Indikator kinerja 2 yaitu Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas berhasil melebihi target, dengan persentase capaian sebesar 100,25%. Adapun formulasi untuk mengukur persentase Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas adalah Jumlah Peserta Didik Jenjang Dikdas dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100 persen. Jumlah peserta didik jenjang dikdas sebanyak 46.951 siswa dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 46.833 jiwa.

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF) dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi			
1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	85%	66.49%	78,22%	85%	78,22%

dan memilih langsung untuk dimasukkan ke Sekolah Dasar saat usia anaknya sudah memenuhi. Selain itu karena kurangnya pemahaman masyarakat/ orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini menjadi salah satu tantangan hambatan dalam pencapaian indikator ini. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi memberikan Sosialisasi kepada masyarakat / orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini di kelas balita stunting di setiap kelurahan serta Meningkatkan kerjasama semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi PAUD.

2. Indikator Kinerja 2 yaitu Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas berhasil melebihi target, dengan persentase capaian sebesar 100,25%. Adapun formulasi untuk mengukur persentase Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas adalah Jumlah Peserta Didik Jenjang Dikdas dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100 persen. Jumlah peserta didik jenjang dikdas sebanyak 46.951 siswa dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 46.833 jiwa.

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF) dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel A.10
Analisis Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi			
1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Persen	85%	66.49%	78.22%	85%	78.22%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi			
2	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	5.50%	34.23%	622.36%	5.50%	622.36%
	Rata-rata Capaian				350.29%		

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF) dengan 2 (dua) indikator kinerja dapat di inpterpretasikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A menunjukkan persentase capaian sebesar 79,07% atau dengan predikat berhasil meskipun belum berhasil mencapai yang ditargetkan pada akhir renstra sebesar 85%. Hal ini dikarenakan terbatasnya kuota akreditasi yang diberikan dari pusat dan adanya kenaikan standar penilaian akreditasi sekolah/madrasah dari periode sebelumnya. Sehingga walaupun secara mutu sekolah tidak ada penurunan namun secara grade nilai akreditasi sekolah menjadi turun. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan sosialisasi dan pendampingan secara intens kepada semua sekolah jenjang pendidikan dasar mengenai aturan penilaian akreditasi yang baru. Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan mutu satuan pendidikan dasar sehingga diperoleh data mutu satuan pendidikan yang nantinya bisa dijadikan dasar dalam merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A. Sampai dengan tahun 2021 sejumlah sekolah dari jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/ MTs) telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi			
2	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Persen	5.50%	34.23%	622.36%	5.50%	622.36%
Rata-rata Capaian					350.29%		

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, anak usia dini dan PNF) dengan 2 (dua) indikator kinerja dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 yaitu Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A menunjukkan persentase capaian sebesar 79.07% atau dengan predikat berhasil meskipun belum berhasil mencapai yang ditargetkan pada akhir renstra sebesar 85%. Hal ini dikarenakan terbatasnya kuota akreditasi yang diberikan dari pusat dan adanya kenaikan standar penilaian akreditasi sekolah/madrasah dari periode sebelumnya. Sehingga walaupun secara mutu sekolah tidak ada penurunan namun secara grade nilai akreditasi sekolah menjadi turun. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan sosialisasi dan pendampingan secara intens kepada semua sekolah jenjang pendidikan dasar mengenai aturan penilaian akreditasi yang baru. Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan mutu satuan pendidikan dasar sehingga diperoleh data mutu satuan pendidikan yang nantinya bisa dijadikan dasar dalam merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A. Sampai dengan tahun 2021 sejumlah sekolah dari jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/ MTs) telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Terakreditasi

Tahun 2021

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
1	SD	67	34	1	1	103
2	SMP	20	8	0	0	28
3	MI	32	11	1	0	44
4	MTs	4	6	0	0	10
	Jml Sekl per Akreditasi	123	59	2	1	185
Persentase (jml sekl per akreditasi/ jumlah sekolah all*100%		66.49%	31.89%	1.08%	0.54%	

Adapun formulasi untuk mengukur persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A adalah Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas kali 100% (123/185x100% = 66,49%).

2. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A berhasil terealisasi 34,23% dari 5,50% yang ditargetkan atau tercapai 622,36% . Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target yaitu adanya dukungan program dan kegiatan yang tepat sasaran, seperti penguatan kelembagaan PAUD, fasilitasi pendampingan akreditasi. Sampai dengan tahun 2021 sejumlah sekolah dari jenjang PAUD (TK/RA) telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12

Jumlah Sekolah Jenjang PAUD Terakreditasi

Tahun 2021

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
1	TK	28	45	2	10	85
2	RA	10	16	0	0	26
	Jml Sekl per	38	61	2	10	111

Tabel 3.11

Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Terakreditasi

Tahun 2021

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
1	SD	67	34	1	1	103
2	SMP	20	8	0	0	28
3	MI	32	11	1	0	44
4	MTs	4	6	0	0	10
	Jml Sekl per Akreditasi	123	59	2	1	185
	Persentase (jml sekl per akreditasi/ jumlah sekolah all*100%	66.49%	31.89%	1.08%	0.54%	

Adapun formulasi untuk mengukur persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A adalah Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas kali 100% (123/185x100% = 66.49%).

2. Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A berhasil terealisasi 24,23% dari 5.50% yang ditargetkan atau tercapai 422.36% . Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target yaitu adanya dukungan program dan kegiatan yang tepat sasaran, seperti penguatan kelembagaan PAUD, fasilitasi pendampingan akreditasi. Sampai dengan tahun 2021 sejumlah sekolah dari jenjang PAUD (TK/RA) telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12

Jumlah Sekolah Jenjang PAUD Terakreditasi

Tahun 2021

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
1	TK	28	45	2	10	85
2	RA	10	16	0	0	26
	Jml Sekl per	38	61	2	10	111

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
	Akreditasi					
Persentase (jml sekl per akreditasi/ jumlah sekolah all*100%		34.23%	54.95%	1.80%	9.01%	

Adapun formulasi untuk mengukur persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A adalah Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD kali 100% (38/111x100% = 34,23%).

➤ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13

Analisis Capaian Sasaran 3

Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi			
1	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	persen	100%	100%	100.00%	100%	100.00 %
2	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	persen	65%	100%	153,85%	65%	153,85 %

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi			
3	Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	2	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rata-rata Capaian				126,92%		

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah dengan 3 (tiga) indikator kinerja dapat di inpterpretasikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil mencapai target sebesar 100% atau tercapai 100%, hal ini berarti semua satuan pendidikan / sekolah (TK=85,RA=26,SD=103,MI=44,SMP=28,MTS=10) sudah menerapkan implementasi pendidikan keagamaan. Faktor pendukung tercapaianya indikator kinerja ini adalah adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan keagamaan serta dukungan anggaran yang memadai. Adapun formulasi untuk mengukur persentase implementasi pendidikan keagamaan adalah Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi pendidikan agama dibagi jumlah seluruh sekolah dikali 100 persen.
2. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah berhasil melebihi target, dari 65% yang ditargetkan berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 153,85%, hal ini berarti semua satuan pendidikan / sekolah (TK=85,RA=26,SD=103,MI=44,SMP=28,MTS=10) sudah menerapkan implementasi pendidikan karakter. Faktor pendukung tercapaianya indikator kinerja ini adalah adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan karakter serta dukungan anggaran yang memadai. Adapun formulasi untuk mengukur persentase implementasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian		
3	Angka kenakalan pelajar	Per-100 siswa	2	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rata-rata Capaian				136.92%		

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 3 yaitu Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah dengan 3 (tiga) indikator kinerja dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil mencapai target sebesar 100% atau tercapai 100%, hal ini berarti semua satuan pendidikan / sekolah (TK=85,RA=26,SD=103,MI=44,SMP=28,MTS=10) sudah menerapkan implementasi pendidikan keagamaan. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan keagamaan serta dukungan anggaran yang memadai. Adapun formulasi untuk mengukur persentase implementasi pendidikan keagamaan adalah Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi pendidikan agama dibagi jumlah seluruh sekolah dikali 100 persen.
2. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah berhasil melebihi target, dari 65% yang ditargetkan berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 153.85%, hal ini berarti semua satuan pendidikan / sekolah (TK=85,RA=26,SD=103,MI=44,SMP=28,MTS=10) sudah menerapkan implementasi pendidikan karakter. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan karakter serta dukungan anggaran yang memadai. Adapun formulasi untuk mengukur persentase implementasi

pendidikan karakter adalah Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi pendidikan karakter dibagi jumlah seluruh sekolah dikali 100 persen.

3. Indikator kinerja 3 yaitu Angka kenakalan pelajar tidak bisa disajikan data capaiannya, disebabkan kenakalan pelajar biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh / daring sehingga banyak pelajar yg beraktivitas di luar lingkngan sekolah dan tidak bisa dimonitor oleh pihak sekolah.

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Capaian Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi			
1	Nilai Evaluasi AKIP	Skor / Nilai	77.5	n/a	n/a%	77.5	n/a

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 4 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja berupa capaian Nilai AKIP tidak dapat disajikan datanya karena Inspektorat Kota Pekalongan belum mengeluarkan nilai AKIP atas penilaian AKIP tahun 2021

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel

pendidikan karakter adalah Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi pendidikan karakter dibagi jumlah seluruh sekolah dikali 100 persen.

3. Indikator Kinerja 3 yaitu Angka Kenakalan pelajar tidak bisa disajikan data capaiannya, disebabkan Kenakalan pelajar biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah sehingga sekolah kesulitan mendapatkan data apalagi saat pandemi pembelajaran dilakukan secara jarak jauh / daring sehingga banyak pelajar yg beraktivitas di luar lingkungan sekolah dan tidak bisa dimonitor oleh pihak sekolah.

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Analisis Capaian Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai Evaluasi AKIP	Skor / Nilai	77.5	n/a	n a%	77.5	n/a

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 4 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja berupa capaian Nilai AKIP tidak dapat disajikan datanya karena Inspektorat Kota Pekalongan belum mengeluarkan nilai AKIP atas penilaian AKIP tahun 2021

➢ Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 3.15

Analisis Capaian Sasaran 5

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi			
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor / Nilai	900	553	61.44%	900	61.44%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 5 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik hanya tercapai 61,44%. Indeks indikator kinerja sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) pada tahun 2021 mempunyai target 900. Realisasi nilai KIP Tahun 2021 yaitu 55,3 (dikonversi 553). Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2021 belum berhasil mencapai target dikarenakan penerapan implementasi dari standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang belum bisa merata di semua jenis layanan, sistem informasi yang ada belum dapat maksimal digunakan salah satunya terkait dengan kurangnya SDM pengelola dan pengaduan layanan yang dirasa belum tuntas.

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/Melampaui Target	3 indikator

dibawah ini :

Tabel 3.15

Analisis Capaian Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi target akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor/ Nilai	900	553	61.44%	900	61.44%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 5 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik hanya tercapai 61.44%. Indeks indikator kinerja sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) pada tahun 2021 mempunyai target 900. Realisasi nilai KIP Tahun 2021 yaitu 55.3 (dikonversi 553). Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2021 belum berhasil mencapai target dikarenakan penerapan implementasi dari standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang belum bisa merata di semua jenis layanan, sistem informasi yang ada belum dapat maksimal digunakan salah satunya terkait dengan kurangnya SDM pengelola dan pengaduan layanan yang dirasa belum tuntas.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/Melampaui Target	3 Indikator

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
2.	Sesuai Target	1 indikator
3.	Tidak mencapai target	3 indikator
4.	n/a	2 indikator

D. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 261,483,345,000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 246,128,071,331 atau sebesar 94,13 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
		4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158,838,781,000	151,404,359,187	95.32
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147,575,000	119,053,000	80.67
01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,125,000	5,433,000	76.25
01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,750,000	3,750,000	100.00

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
2.	Sesuai Target	1 indikator
3.	Tidak mencapai target	3 indikator
4.	n a	2 indikator

D. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 261.483.445.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 246.128.071.011 atau sebesar 94.13 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
		4	5	6
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158,836,781,000	151,404,359,187	95.32
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147,575,000	119,053,000	80.67
01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,125,000	5,435,000	76.28
01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,750,000	3,750,000	100.00

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136,700,000	109,870,000	80.37
202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**156,985,943,000**	**149,725,162,048**	**95.37**
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	156,447,448,000	149,191,017,048	95.36
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	534,745,000	530,395,000	99.19
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,750,000	3,750,000	100.00
203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**86,880,000.00**	**69,730,000**	**80.26**
01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	86,880,000.00	69,730,000	80.26
205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**-**	**0.00**
01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	0.00
206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**816,038,000**	**773,767,184**	**94.82**
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,878,800	98.79
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348,450,000	338,156,300	97.05
01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,250,000	8,090,000	98.06
01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72,000,000	67,696,500	94.02
01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,400,000	14,345,600	99.62
01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,250,000	3,151,000	96.95
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102,688,000	94,578,984	92.10
01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	257,000,000	237,870,000	92.56
208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**614,250,000**	**536,070,159**	**87.27**
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	9,250,000	77.08
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323,950,000	248,525,159	76.72
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278,300,000	278,295,000	100.00
209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188,095,000**	**180,576,796**	**96.00**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**156,585,943,000**	**149,721,411,040**	**95.37**
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[illegible]	580,384,000	[illegible]
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,750,000	1,750,000	100.00
203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**66,880,000**	**65,736,000**	[illegible]
01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	0	-	0.00
01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	0.00
206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**816,228,000**	**773,767,134**	**94.72**
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	[illegible]	8,000,000	[illegible]
01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**616,250,000**	**558,070,159**	[illegible]
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[illegible]	[illegible]	100.00
209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188,095,000**	**180,976,796**	[illegible]

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,148,000	51,132,900	87.94
01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76,547,000	76,546,396	100.00
01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,400,000	52,897,500	99.06
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**87,040,173,000**	**79,394,680,544**	**91.22**
201	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**38,913,775,000**	**36,807,873,884**	**94.59**
02.201.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2,839,375,000	2,685,890,532	94.59
02.201.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,683,350,000	1,617,744,050	96.10
02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9,373,500,000	8,622,616,185	91.99
02.201.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,247,500,000	1,118,785,512	89.68
02.201.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,320,000,000	1,200,025,050	90.91
02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,648,592,000	1,554,570,600	94.30
02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	420,000,000	373,782,000	89.00
02.201.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	250,000,000	146,875,000	58.75
02.201.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	378,000,000	248,575,000	65.76
02.201.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	420,000,000	404,327,000	96.27
02.201.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120,000,000	117,359,000	97.80
02.201.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,153,500,000	2,142,523,000	99.49
02.201.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	440,250,000	339,042,000	77.01
02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	36,750,000	32,934,000	89.62
02.201.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,676,200,000	2,667,925,500	99.69
02.201.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	-	0.00
02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	362,725,000	332,225,500	91.59

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	[illegible]	[illegible]	100.00
01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[illegible]	[illegible]	99.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	[illegible]	72,294,580,344	[illegible]
201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,330,000,000	[illegible]	[illegible]
02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	[illegible]	[illegible]	58.75
02.201.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	[illegible]	2,142,522,000	[illegible]
02.201.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	36,750,000	32,924,000	[illegible]
02.201.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.201.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	-	0.00
02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,486,533,000	13,159,015,955	97.57
02.201.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57,500,000	43,658,000	75.93
III	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**34,924,661,000**	**31,089,136,360**	**89.02**
02.202.06	Pembangunan Laboratorium	519,080,000	369,838,300	71.25
02.202.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	965,960,000	895,728,000	92.73
02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9,625,435,000	8,087,710,766	84.02
02.202.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1,527,000,000	1,325,630,115	86.81
02.202.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	218,700,000	174,005,157	79.56
02.202.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	909,010,000	765,336,361	84.19
02.202.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2,274,930,000	1,828,155,898	80.36
02.202.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,373,695,000	2,102,744,905	88.59
02.202.25	Pengadaan Mebel Sekolah	31,400,000	30,960,000	98.60
02.202.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	107,115,000	88,705,000	82.81
02.202.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	411,520,000	245,115,000	59.56
02.202.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	725,000,000	608,074,500	83.87
02.202.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25,000,000	24,825,000	99.30
02.202.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,829,220,000	2,689,761,600	95.07
02.202.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	224,585,000	149,740,800	66.67
02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25,000,000	23,440,000	93.76
02.202.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	260,200,000	258,980,000	99.53
02.202.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	-	0.00
02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	265,658,000	215,956,472	81.29
02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10,940,109,000	10,628,272,454	97.15

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,486,783,000	13,159,015,555	97.57
02.201.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57,300,000	43,655,000	75.95
121	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34,034,651,010	31,859,156,560	93.62
02.202.06	Pembangunan Laboratorium	510,380,000	363,636,000	71.25
02.202.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	985,950,000	958,726,000	97.24
02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,625,135,000	5,566,116,796	84.02
02.202.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1,520,000,000	1,271,650,115	83.66
02.202.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	218,720,000	174,606,157	79.83
02.202.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	895,010,000	768,556,331	85.87
02.202.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	4,277,058,000	1,825,115,898	42.67
02.202.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,205,095,000	2,102,744,965	65.59
02.202.25	Pengadaan Mebel Sekolah	31,400,000	30,960,000	98.60
02.202.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	107,115,000	88,705,000	82.81
02.202.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	411,520,000	245,115,000	59.56
02.202.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	725,000,000	608,014,500	83.86
02.202.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25,000,000	24,825,000	99.30
02.202.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,829,220,000	2,689,741,600	95.07
02.202.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	254,555,000	149,740,800	58.82
02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25,000,000	23,440,000	93.76
02.202.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	260,200,000	258,960,000	99.53
02.202.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	0.00
02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	265,655,000	215,956,472	81.29
02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10,946,109,000	10,635,272,454	97.15

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.202.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40,000,000	34,442,000	86.11
02.202.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	515,544,000	444,329,330	86.19
02.202.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	110,500,000	97,384,702	88.13
203	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	**10,586,142,000**	**9,128,024,600**	**86.23**
02.203.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	285,000,000	271,217,500	95.16
02.203.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	479,806,000	472,333,600	98.44
02.203.03	*Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang* Kelas/Ruang Guru PAUD	1,680,997,000	1,595,178,700	94.89
02.203.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	46,739,000	45,282,050	96.88
02.203.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	25,115,000	25,115,000	100.00
02.203.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	35,115,000	34,648,000	98.67
02.203.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	5,115,000	5,115,000	100.0
02.203.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	177,650,000	172,912,600	97.33
02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	60,000,000	58,928,000	98.21
02.203.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	7,559,000,000	6,250,523,400	82.69
02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5,115,000	5,115,000	100.00
02.203.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	-	0.00
02.203.17	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* PAUD	226,490,000	191,655,750	84.62
204	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2,615,595,000**	**2,369,645,700**	**90.60**
02.204.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	157,500,000	145,850,000	92.60
02.204.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	-	0.00
02.204.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2,342,275,000	2,126,107,000	90.77
02.204.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30,000,000	26,229,700	87.43

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.202.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40,000,000	34,444,000	86.11
02.202.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	[illegible]	[illegible]	88.19
02.202.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	110,500,000	97,384,702	88.13
203	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**10,346,142,000**	**9,128,024,600**	**88.23**
02.203.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	[illegible]	273,277,500	95.16
02.203.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	475,460,000	472,783,800	99.44
02.203.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,602,347,000	1,599,178,700	99.80
02.203.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.203.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	25,115,000	25,115,000	100.00
02.203.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	35,115,000	34,648,000	98.67
02.203.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	5,115,000	5,115,000	100.00
02.203.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	177,050,000	172,313,800	97.33
02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	40,000,000	[illegible]	[illegible]
02.203.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	7,585,000,000	6,250,525,400	82.41
02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5,115,000	5,115,000	100.00
02.203.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	-	0.00
02.203.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	226,490,000	191,655,750	84.62
204	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2,575,595,000**	**2,369,945,700**	**92.02**
02.204.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	157,000,000	145,750,200	92.83
02.204.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	-	0.00
02.204.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2,368,595,000	[illegible]	[illegible]
02.204.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50,000,000	[illegible]	52.43

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.204.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0		
02.204.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85,820,000	71,459,000	83.27
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***89,951,000***	***88,784,900***	***98.70***
201	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**43,588,000**	**42,721,900**	**98.01**
03.201.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	43,588,000	42,721,900	98.01
202	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**46,363,000**	**46,063,000**	**99.35**
03.202.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	46,363,000	46,063,000	99.35
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**15,514,440,000**	**15,240,246,700**	**98.23**
201	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan *Nonformal/Kesetaraan***	**15,514,440,000**	**15,240,246,700**	**98.23**
04.201.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	609,152,000	525,207,000	86.22
04.201.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14,905,288,000	14,715,039,700	98.72
		261,483,345,000	**246,128,071,331**	**94.13**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	
			NOMINAL	%
02.204.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0		
02.204.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85,820,000	71,459,000	83.27
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**89,951,000**	**88,784,900**	**98.70**
201	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**43,588,000**	**42,721,900**	**98.01**
03.201.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	43,588,000	42,721,900	98.01
202	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**46,363,000**	**46,063,000**	**99.35**
03.202.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	46,363,000	46,063,000	99.35
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**15,514,440,000**	**15,240,246,700**	**98.23**
201	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**15,514,440,000**	**15,240,246,700**	**98.23**
04.201.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	536,152,000	525,207,000	98.22
04.201.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14,978,288,000	14,715,039,700	98.22
		261,483,345,000	**246,128,072,331**	**94.13**

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan persentase nilai capaian 91,79% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan presentase nilai capaian 350,29% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan presentase nilai capaian 126,92% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator namun belum dapat disajikan data capaiannya, sehingga belum dapat diketahui nilai capaian maupun interpretasinya.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap Kinerja yang telah dicapai baik *berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang* mencerminkan keberhasilan dan kegagalan

Dalam tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan persentase nilai capaian 91,79% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan presentase nilai capaian 350,29% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan presentase nilai capaian 126,92% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator namun belum dapat disajikan data capaiannya, sehingga belum dapat diketahui nilai capaian maupun interpretasinya.

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan presentase nilai capaian 61,44% atau interpretasi kurang.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (Lima) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2021 sebesar Rp. 261,483,345,000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 246,128,071,331 atau sebesar 94,13 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2022

KEPALA DINASPENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19650211 199403 1 005